KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-104.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	JAWABAN SURAT TELAAH/PENDAPAT HUKUM DI BIDANG PEWARGANEGARAAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan status pewarganegaraan 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan pewarganegaraan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Salinan SK 2. SOP Pewarganegaraan 3. SOP Persuratan	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JAWABAN SURAT TELAAH/PENDAPAT HUKUM DI BIDANG PEWARGANEGARAAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu			Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, memeriksa dan mendisposisikan surat permintaan pendapat hukum di Bidang Pewarganegaraan kepada Penanggung Jawab untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku				Surat permintaan pendapat hukum, lembar disposisi	2 Hari	Disposisi Direktur Tata Negara	
2	Mempelajari dan mendisposisikan surat permintaan pendapat hukum di Bidang Pewarganegaraan kepada Verifikator untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku				Surat permintaan pendapat hukum, lembar disposisi	1 Hari	Disposisi Penanggung Jawab	
3	Membuat konsep surat, menganalis, menyiapkan data dukung perihal permintaan pendapat hukum di Bidang Pewarganegaraan				Surat permintaan pendapat hukum, lembar disposisi, Nota Dinas	3 Hari	Nota Dinas dan Konsep surat Telaah/pendapat hukum	
4	Memeriksa dan mengoreksi konsep surat pendapat hukum di bidang pewarganegaraan, Jika setuju memeberikan paraf dan menyampaikan kepada Direktur Tata Negara			T	Lembar disposisi, Nota Dinas dan Konsep surat Telaah/pendapat hukum	1 Hari	Nota Dinas dan Konsep surat Telaah/pendapat hukum	
5	Mengetahui dan menyetujui Surat jawaban permintaan pendapat hukum Pewarganegaraan, Jika setuju memberikan tanda tangan dan menyampaikan kepada Pemohon		Y		Lembar disposisi, Nota Dinas dan Konsep surat Telaah/pendapat hukum	1 Hari	Surat Telaah/Pendapat Hukum	